

# **BAB I**

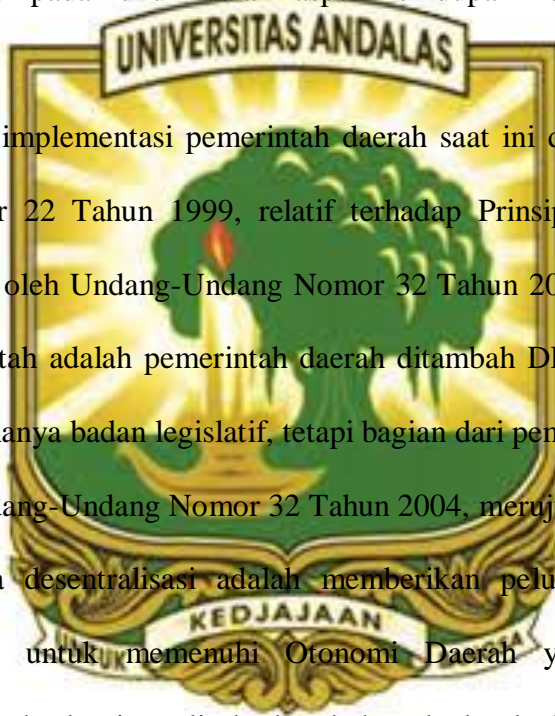
## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan daerah sangat penting untuk merealisasikan kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Sebagai aturan hukum, administrasi pemerintahan oleh pemerintah Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dalam aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara .

Salah satu implementasi pemerintah daerah saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, relatif terhadap Prinsip pemerintah daerah, disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa pemerintah adalah pemerintah daerah ditambah DPRD, oleh karena itu, DPRD. bukan hanya badan legislatif, tetapi bagian dari pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, merujuk kepada Pemerintah Daerah, makna desentralisasi adalah memberikan peluang dan fleksibilitas kepada daerah untuk memenuhi Otonomi Daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan juga disebutkan bahwa badan legislatif daerah (DPRD) memiliki salah satu fungsi, undang-undang. Legislasi adalah pemberian tugas dan wewenang untuk membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk disetujui ketika menetapkan Peraturan Daerah. Undang-undang ini juga memiliki fungsi mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menentukan bagaimana pembangunan di daerah akan dilakukan..



Rumuskan dan uraikan peraturan daerah sebagai implementasi dari kerja legislasi. DPRD bekerja erat dengan Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan menyusun peraturan daerah. Hal ini juga ditemukan dalam pasal 140, paragraf 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, merujuk kepada Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) dapat berasal dari DPRD, Gubernur atau Bupati / Walikota. Selain itu, rancangan peraturan harus mencapai kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah untuk diskusi lebih lanjut. Tanpa kesepakatan bersama, rancangan peraturan tidak akan lagi dibahas.

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah untuk memberdayakan masyarakat dan mencapai kemerdekaan daerah. Penjabaran peraturan daerah harus didasarkan pada prinsip pembentukan undang-undang, antara lain; mendukung kepentingan rakyat, membela hak asasi manusia, berorientasi lingkungan dan budaya. Dengan demikian, peraturan daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur kegiatan pemerintah di daerah tersebut.

Dengan demikian, proses penyusunan Ranperda sangat menentukan kelancaran pembahasan di DPRD, karena kualitas suatu Ranperda ditentukan oleh bagaimana manfaat dan tujuan dari peraturan daerah tersebut.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah magang ini adalah :

1. Apa saja fungsi bagian sidang dan perundang - undangan yang ada di DPRD Kota Padang selaku bagian yang membantu anggota dewan untuk mengambil keputusan dalam penyusunan perda ?
2. Bagaimana Tata Cara Penyusunan dan Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah pada kantor DPRD Kota Padang?
3. Apa saja standar operasional prosedur (SOP) dalam Penyusunan dan Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah pada kantor DPRD Kota Padang?

### 1.3 Tujuan Magang

Adapun tujuan penulis laporan ini adalah:

1. Untuk mrngetahui tugas dan fungsi bagian perundang-undangan selaku bidang yang ikut menaungi kebijakan pengambilan keputusan yang dilakukan dewan di kantor DPRD Kota Padang.
2. Untuk mengetahui Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah oleh Anggota Dewan pada kantor DPRD kota Padang.
3. Untuk mengetahui metode yang digunakan dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah pada kantor DPRD Kota Padang.



### 1.4 Manfaat Magang

#### a. Bagi Penulis

Dengan adanya kegiatan magang ini penulis bisa mendapatkan pengetahuan secara langsung tentang dunia kerja. Dan juga penulis dapat

mengetahui persoalan apa saja yang dialami pada saat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah dalam aktivitas dan tugas Kedewanan di kantor DPRD Kota Padang. Serta melatih softskill tentang cara berkomunikasi dan bersosialisasi dalam dunia kerja.

b. Bagi Universitas

Diharapkan tulisan ini dapat menambah pengetahuan tentang system dan prosedur perancangan peraturan daerah kota Padang. Meningkatkan dan menciptakan kualitas mahasiswa dengan keahlian professional yang siap pakai untuk bersaing di dunia kerja, serta menjalin hubungan baik antara pihak Universitas dengan Perusahaan.

c. Bagi Perusahaan

Dengan adanya praktik kerja langsung oleh mahasiswa diharapkan dapat membantu pihak perusahaan dalam bentuk sumbangan tenaga dan pemikiran yang bermanfaat bagi perusahaan. Serta menjadi saran bagi perusahaan untuk melihat mahasiswa yang potensial untuk bekerja, sehingga apabila perusahaan bisa merekrut mahasiswa tersebut.



## 1.5 Bentuk Kegiatan Magang

Sesuai program studi penulis, yaitu program studi Kesekretariatan/Managament Perkantoran. Dimana pada program ini, penulis lebih banyak mempelajari management di DPRD Kota Padang. Oleh karena itu, untuk penyempurnaan pelajaran yang penulis terima di perkuliahan maka penulis memilih Kantor DPRD Kota Padang sebagai tempat mempraktekannya. Disini penulis melakukan praktek selama 40 hari kerja. Pelaksanaan kagiatan ini

dilaksanakan pada hari kerja yaitu senin sampai jum'at yang dimulai pukul 07.30 dan berakhir pada pukul 16.00

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan laporan ini masalah yang akan dibahas dibatasi sesuai dengan kapasitasnya. Untuk mencapai hal tersebut perlu dibuat sistematika penulisan yang dapat dilihat sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan Bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, bentuk kegiatan magang dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas teori-teori yang menjelaskan mengenai objek penelitian yang penulis lakukan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan.

### **BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI**

Bab ini menyangkut sejarah berdirinya kantor DPRD Kota Padang, Struktur Organisasi, Ruang Lingkup kantor DPRD Kota Padang, serta visi misi kantor DPRD Kota Padang.

### **BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH OLEH ANGGOTA DEWAN PADA KANTOR DPRD KOTA PADANG**





Bab ini mengenal tata cara penyusunan rancangan peraturan daerah, tujuan dan manfaat, serta metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

## **BAB V KESIMPULAN dan SARAN**

Berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil-hasil pembahasan magang yang telah dilaksanakan.

